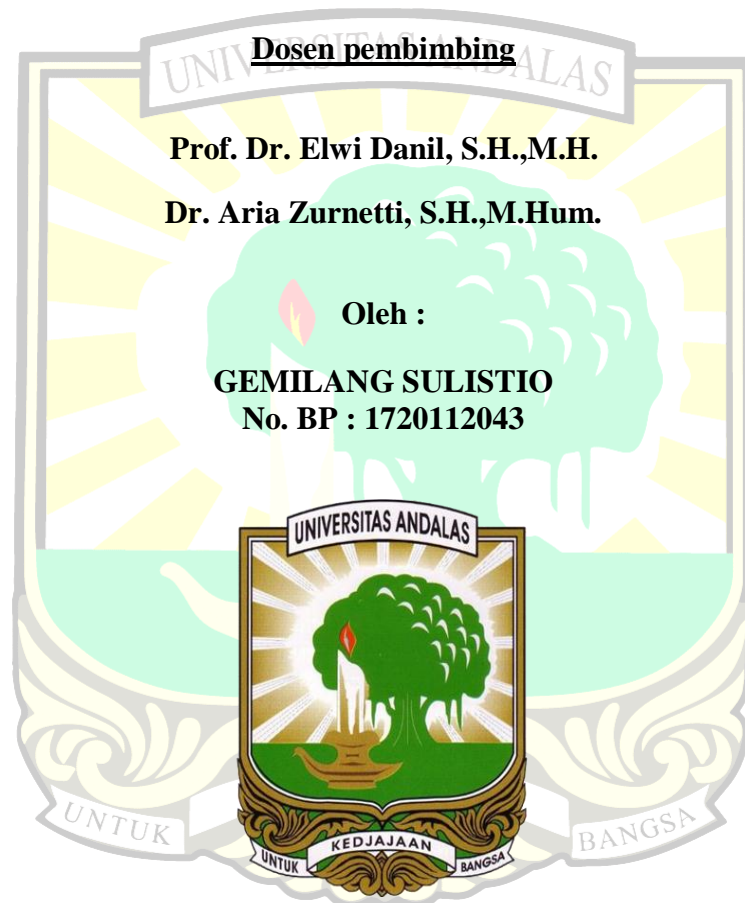


DRAF TESIS

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn)

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Dosen pembimbing

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H.

Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.Hum.

Oleh :

GEMILANG SULISTIO

No. BP : 1720112043

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn)

(Gemilang Sulistio, 1720112043, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 126 halaman, 2021)

ABSTRAK

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering kali terjadi dalam perkembangan teknologi dan informasi di era digital ini, adalah tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana cyber yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal dimaksud yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda sebanyak Rp750.000.000. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain. Dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada wilayah hukum pengadilan Negeri Pariaman kita dapat melihat putusan Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yang melanggar UU ITE. Hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn atas nama Ikhlas Darma Murya panggilan Ikhlas yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn?; 2. Bagaimanakah sudut pandang keadilan dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa melainkan juga untuk kepentingan masyarakat yang terkait dengan kemanusiaan dalam hal ini karena pelayanan masyarakat. 2. Sudut pandang keadilan menilai bahwa penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan telah sesuai dengan pandangan dan prinsip keadilan khususnya menurut Rawls, sedangkan menurut teori kemanfaatan Bentham, kemanfaatan juga telah diberikan karena pada hakekat pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan aspek bahwa pidana tidak lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan untuk perbaikan ke depannya penulis menyarankan untuk adanya suatu yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang dapat menjadi pedoman-pedoman dalam penjatuhan pidana yang demikian, serta pemerintah lebih melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip mengemukakan pendapat sehingga dapat mencegah perbuatan pidana dilakukan kembali.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana, Pidana Bersyarat, Pencemaran Nama Baik

**CONSIDERATION OF THE JUDGET TO TELL A CONDITIONED
CRIMINAL IN THE CRIME OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL
MEDIA**

**(Study on the Establishment of Judges of the Pariaman District Court Number
13/Pid.Sus/2019/PN Pmn)**

(Gemilang Sulistio, 1720112043, Graduate Faculty Of Law at Universitas
Andalas, 126 pages, 2021)

ABSTRACT

One form of unlawful action that often occurs in the development of technology and information in this digital era, is an act of defamation or humiliation that is carried out through social media. Defamation through social media is included in the category of cyber crime as regulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. The threat of punishment for violating the article referred to is a maximum imprisonment of 4 years and / or a fine of IDR 750,000,000. In the event that the Judge imposes a maximum sentence of one year or imprisonment, not including substitute imprisonment, the Judge may also order that the sentence does not have to be served, unless later there is a Judge's decision which determines otherwise. good name through social media in the jurisdiction of the Pariaman District Court, we can see the Judge's decision to impose conditional punishment on the Defendant who violated the ITE Law. The judge in decision Number 13 / Pid.Sus / 2019 / PN Pmn on behalf of Ikhlas Darma Murya called Ikhlas who was legally and convincingly proven to have violated Article 45 paragraph (3) Jo. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. The formulation of the problems in this study, namely: 1. How is the Judge's consideration in imposing conditional criminal offenses in criminal defamation through social media in the Legal Area of the Pariaman District Court ?; 2. What is the point of view of justice and benefit in imposing conditional sentences against the perpetrators of criminal defamation through social media in the Legal Area of the Pariaman District Court? This research is a normative juridical study using secondary data. This research is a descriptive analysis. The results showed that: 1. The judge's consideration in imposing conditional sentences against the Defendant was based on the consideration that the defendant's actions were committed not only for the defendant's personal interests but also for the benefit of the community related to humanity in this case because of community service. 2. The justice point of view considers that the conditional sentence imposed is in accordance with the views and principles of justice in particular according to Rawls, whereas according to Bentham's theory of benefit, benefits have also been given because in essence the sentence imposed must consider the aspect that the punishment is not heavier than the criminal act. For future improvements, the authors suggest that there is a jurisprudence from the Supreme Court which can serve as guidelines for imposing such crimes, and the government should further socialize and educate on the principles of expressing opinions so as to prevent criminal acts from being committed again

Keywords: Judges, Criminal, Conditional Crime, Defamation Considerations